

KAMPANYE PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH MELALUI KEWIRAUSAHAAN DI JAWA TIMUR

Monika Teguh¹, Hilda Yunita Wono², Gabriela Laras Dewi Swastika³

^{1,2,3}) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media,
Universitas Ciputra Surabaya
e-mail: monika.teguh@ciputra.ac.id

Abstrak

Isu kesejahteraan buruh menjadi hal yang selalu diperdebatkan. Acap kali terjadi demonstrasi karena buruh merasa tidak mendapatkan upah yang layak sehingga kesejahteraan mereka tidak meningkat. Padahal banyak juga buruh yang sesungguhnya hidupnya cukup sejahtera asalkan dapat mengelola keuangannya dengan baik. Menanggapi fenomena ini, dosen dan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Surabaya, berkolaborasi dengan Wadah Asah Solidaritas (WADAS) dari Yayasan Kasih Bangsa Surabaya (YKBS), membuat kampanye tentang kesejahteraan buruh di Jawa Timur. Kampanye diawali dengan penelitian kondisi kesejahteraan buruh di Jawa Timur. Hasil penelitian ini kemudian dipaparkan dalam bentuk sarasehan bersama serikat buruh. Dalam sarasehan, didiskusikan hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan buruh di Jawa Timur serta penyebab peningkatan tersebut. Kemudian narasumber juga memberikan masukan-masukan tentang berwirausaha sebagai penghasilan tambahan bagi buruh. Hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi serikat buruh tentang cara-cara peningkatan kesejahteraan bagi buruh, utamanya melalui kegiatan berwirausaha. Dengan kampanye ini, serikat buruh dapat membagikan pengetahuan yang mereka peroleh kepada rekan-rekan buruh lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kata kunci: Kampanye, Buruh, Kesejahteraan Buruh, Kewirausahaan

Abstract

The issue of workers' welfare has always been debated. Demonstrations often occur because workers feel they are not getting a decent wage so that their welfare does not increase. Even though there are many workers whose lives are actually quite prosperous as long as they can manage their finances well. Responding to this phenomenon, lecturers and students of the communication science study program-Universitas Ciputra Surabaya, in collaboration with the Solidarity Sharpening Forum (WADAS) of the Surabaya Kasih Bangsa Foundation (YKBS), created a campaign on the welfare of workers in East Java. The campaign begins with research on the welfare conditions of workers in East Java. The results of this study were then presented in the form of a workshop with labor unions. In the workshop, the results of research showing an increase in the welfare of workers in East Java were discussed and the reasons for this increase. Then the resource person also provided input on entrepreneurship as additional income for workers. The results of this study provide new knowledge for labor unions about ways to increase welfare for workers, especially through entrepreneurship activities. With this campaign, labor unions can share the knowledge they gain with other fellow workers to improve their welfare.

Keywords: Campaign, Labor, Labor Welfare, Entrepreneurship

PENDAHULUAN

Isu tentang kesejahteraan buruh selalu menjadi polemik tersendiri di Indonesia. Kesejahteraan buruh selalu dihubungkan dengan sistem pengupahan, di mana Upah Minimum Regional (UMR) selalu diperdebatkan. Di satu sisi buruh menuntut agar UMR dapat meningkat secara signifikan. Namun di sisi lain, pemberi kerja juga mengeluhkan biaya upah yang tinggi dapat mengganggu kinerja perusahaan mereka. Maka dari itu pemerintah harus menjadi penengah yang adil dalam menghadapi isu ini untuk mencegah kedua belah pihak saling berbentrokan. Karena bagaimana pun iklim usaha yang kondusif diperlukan agar perkenomian negara dapat terjaga.

Sebelum membahas lebih jauh tentang isu kesejahteraan buruh, ada baiknya dipahami terlebih dahulu mengenai upah. Upah merupakan ikatan utama antara pemberi kerja dengan buruh. Pemberi kerja memberikan upah sebagai imbalan atas energi, pikiran, aktivitas, dan kinerja yang dilakukan oleh tenaga kerja, yang terikat dalam suatu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja. Penentuan

upah ditentukan oleh banyak hal, antara lain aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek hukum. Dalam aspek teknis, pemberi kerja harus memikirkan jumlah dan mekanisme pemberian upah kepada tenaga kerja. Pada aspek ekonomis, pemberi kerja menetapkan besaran upah berdasarkan kondisi ekonomi makro maupun mikro pada wilayah di mana perusahaan beroperasi, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan. Sedangkan dalam aspek hukum, pemberi kerja wajib menaati kewenangan pemerintah dalam standarisasi minimal besaran upah dan pelaksanaan pemberian upah. Keberadaan upah ini menjadi penting bagi tenaga kerja karena upah dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya dan orang-orang yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Maka dari itu pemberian upah haruslah adil dan sesuai (Trimaya, 2014).

Dalam hal pemberian upah, pemerintah telah menetapkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa upah merupakan hak dari tenaga kerja dalam bentuk uang. Upah merupakan imbalan dari pemberi kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja, yang harus dibayarkan sesuai ketetapan. Termasuk dalam komponen upah adalah tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Peraturan tersebut diperbaharui dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja, dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Pada dasarnya definisi upah belum berubah dari Undang-Undang sebelumnya. Namun ada penambahan tentang penerapan sistem pengupahan, yakni harus tanpa diskriminasi. Ukuran pemberian upah juga harus diperhitungkan dengan tepat sehingga layak bagi kehidupan. Kebijakan dari pemerintah pusat ini, kemudian akan didefinisikan oleh masing-masing pemerintah daerah menurut kondisi di masing-masing wilayahnya. Standar hidup layak di setiap wilayah memang berbeda dan tidak dapat disamakan. Maka dari itu pemerintah daerah harus dengan pertimbangan matang menetapkan besaran upah minimum di daerahnya agar para pekerja dan keluarganya dapat hidup dengan layak (Abduh, 2022).

Meskipun telah dilakukan upaya regulasi oleh pemerintah, para tenaga kerja juga masih rentan terhadap berbagai kondisi. Salah satunya adalah sistem kerja kontrak dan outsourcing yang juga masih diizinkan dalam peraturan perundangan. Sistem kerja kontrak dan outsourcing mengizinkan pengusaha mengalihkan atau mendelegasikan sejumlah proses bisnis kepada penyedia jasa. Penyedia jasa ini kemudian melakukan proses manajemen dan administrasi dengan tenaga kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan proses kerja di perusahaan penyewa jasa outsourcing tersebut. Dengan adanya sistem kerja kontrak maupun outsourcing, tenaga kerja menjadi rawan kehilangan jaminan dan hak-haknya. Hal ini tentunya membuat banyak tenaga kerja menjadi khawatir akan kelangsungan hidup mereka dan bagaimana mereka bisa menjamin kesejahteraan keluarganya (Milinum, 2022). Di Jawa Timur, tempat di mana penulis dan tim berdomisili, masalah yang dihadapi buruh ini juga masih terjadi. Salah satunya adalah tidak adanya jaminan pensiun. Buruh bisa saja tidak mendapatkan hak-haknya untuk bertahan hidup ketika sudah mencapai usia pensiun. Meskipun sudah mengabdikan cukup panjang pada suatu perusahaan, namun saat sudah waktu pensiun buruh tidak dapat mengajukan permohonan pensiun dengan pesangon karena perusahaan merasa tidak memensiunkan buruh tersebut (Soleh, 2019).

Melihat fenomena ini, dosen dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media (FIKOM) Universitas Ciputra Surabaya bekerjasama dengan Wadah Asah Solidaritas (WADAS) dari Yayasan Kasih Bangsa Surabaya (YKBS), mencoba mengurai lebih jauh permasalahan buruh. Permasalahan buruh ini dirasa perlu untuk diwadahi lebih jauh karena jumlahnya yang cukup besar, sehingga tentunya akan mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah Jawa Timur. Maka dari itu, sebagai langkah awal, tim FIKOM melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui kondisi kesejahteraan buruh dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Penelitian dilakukan dengan dua metode, yang pertama adalah Focused Group Discussion (FGD) dengan perwakilan dari Serikat Buruh. WADAS sebagai lembaga pendampingan buruh industri dan perkebunan, menjadi jembatan antara tim FIKOM dengan perwakilan dari Serikat Buruh di Surabaya. Dalam FGD ini, tim FIKOM mencoba mendalami realita yang dihadapi buruh terkait dengan kesejahteraan hidupnya. Dari FGD ini diketahui terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan hidup seorang buruh, antara lain usia, status pernikahan, besaran jumlah keluarga yang ditanggung, serta penghasilan baik penghasilan utama berupa gaji buruh maupun penghasilan tambahan lainnya. Dengan banyaknya faktor tersebut, maka kehidupan satu buruh dengan buruh lainnya tidak dapat disamakan. Buruh dengan penghasilan yang sama, jika memiliki perbedaan jumlah keluarga yang ditanggung, maka bisa jadi tingkat

kesejahteraannya berbeda. Maka dari itu, mendorong kesejahteraan buruh dengan standarisasi yang sama cukup sulit dilakukan.

Mendapati fenomena ini, maka tim FIKOM mencoba meneliti lebih jauh dengan menyebarkan survei berkaitan dengan perubahan formulasi perhitungan upah dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan buruh. Responden dipilih secara snowball berdasarkan masukan dari perwakilan Serikat Buruh. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui Google Form dikarenakan responden tersebar di 19 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Probolinggo, Tuban, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Kediri, Gresik, Situbondo, Bondowoso, Mojokerto, Lamongan, Tulungagung, Nganjuk, dan Blitar. Jumlah responden yang terkumpul adalah 121 orang. Responden yang mengisi survei mayoritas berusia 18-36 tahun dengan status sudah kawin dengan persentase 49,6% dan belum kawin dengan persentase 40,5%, buruh yang berkontribusi berasal dari berbagai sektor industri, mulai dari buruh pabrik biasa, pendidikan, manufaktur, pegawai toko dan pegawai restoran. Jumlah responden dirasa sudah cukup karena telah mewakili berbagai bidang kerja di berbagai wilayah dengan standarisasi upah yang berbeda di Jawa Timur. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa mayoritas responden telah mendapatkan penghitungan upah dan penunjang kesejahteraan yang baik. Hal itu nampak dari 64,5% telah mendapatkan upah sesuai UMK atau diatas UMK, 58% telah mendapatkan upah sesuai dengan kinerja individu, 43% persen buruh mendapatkan dana pensiun yang adil, 50,4% memperoleh asuransi perusahaan, 47,1% memperoleh fasilitas kredit dengan mudah sebagai fasilitas penunjang kesejahteraan, 61,2% memperoleh pembinaan dari perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Namun tidak dapat diabaikan masih ditemukan juga buruh yang belum mendapatkan upah sesuai ketetapan dan juga tidak mendapatkan penunjang untuk kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka tim FIKOM mencoba memberikan solusi melalui kegiatan kampanye peningkatan kesejahteraan buruh. Kampanye merupakan strategi komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu, melalui proses perencanaan dan manajemen dalam suatu praktik operasional. Kampanye secara umum bertujuan untuk mempersuasi target sasaran, baik dalam bentuk memotivasi untuk melakukan suatu hal, maupun memberikan dampak tertentu sesuai dengan rencana. Terdapat tiga tahapan dalam pembentukan hasil dari suatu proses kampanye, yaitu awareness, attitude, dan action. Pada tahap awareness, kampanye dipusatkan pada pembentukan kesadaran atau pengetahuan mengenai suatu topik atau isu yang diangkat. Kemudian pada tahap attitude, target sasaran didorong untuk bersimpati, menyukai, berpihak, dan peduli terhadap isu yang telah dikembangkan tersebut. Akhirnya di tahapan action, target sasaran diharapkan berperilaku sesuai dengan tujuan dari kampanye (Harvianti & Kurniadi, 2021). Sesuai dengan bidang keahlian dari tim FIKOM, yaitu entrepreneurial communication, maka kegiatan kampanye yang dilakukan tim FIKOM bertujuan untuk meningkatkan awareness tentang kondisi kesejahteraan buruh di Jawa Timur, membentuk pemikiran untuk mau memperbesar peluang sejahtera bagi buruh, serta membagikan ilmu entrepreneurship sebagai alternatif tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Jawa Timur.

METODE

Berdasarkan FGD dan penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh tim FIKOM, maka dilakukan kegiatan kampanye dalam bentuk sarasehan. Target utama dari sarasehan ini adalah perwakilan serikat buruh yang memiliki akses untuk menyebarkan kampanye kepada rekan-rekannya sesama buruh. Sarasehan dengan sedikit orang dirasa lebih efektif karena dapat dibuka diskusi mengenai hasil penelitian serta cara-cara meningkatkan kesejahteraan buruh secara riil. Tujuan yang ingin dicapai dalam kampanye ini adalah adanya perubahan mindset para buruh agar menyadari kondisinya dan mau membuka peluang untuk menjadi lebih sejahtera melalui kewirausahaan.

Sarasehan dilakukan dalam dua kali pertemuan tatap muka di bulan Desember 2022, bertempat di kantor Yayasan Kasih Bangsa Surabaya yang berlokasi di Jalan Simo Surabaya. Dalam sarasehan ini hadir 12 orang perwakilan serikat buruh, perwakilan dari WADAS, serta seluruh tim FIKOM yang terlibat. Sarasehan dibentuk nyaman dan kekeluargaan dengan model diskusi kelompok, di mana tidak ada pemisah antara tim FIKOM dengan perwakilan serikat buruh. Tim FIKOM sengaja menghindari kampanye berbentuk classroom yang berfokus pada pembicara utama saja. Hal ini dilakukan agar suasana lebih cair, serta diskusi bisa berjalan dengan lebih lancar. Diharapkan dengan demikian, maka tujuan kampanye akan lebih mudah tercapai. Sarasehan diawali dengan pembukaan dan doa bersama yang dipimpin oleh MC yang dipilih dari tim FIKOM. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan

dari perwakilan tim WADAS. Selanjutnya dilakukan pemaparan hasil penelitian oleh perwakilan tim FIKOM. Hasil penelitian dipaparkan menggunakan bantuan layar yang telah disediakan oleh YKBS. Pada saat pemaparan ini, dibuka langsung diskusi yang dipimpin oleh moderator dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran akan kondisi buruh di Jawa Timur. Perwakilan buruh dapat menanggapi hasil penelitian yang telah dilakukan, serta melakukan brainstorming mengenai kondisi di lapangan yang mereka juga temui. Dari situ kemudian disimpulkan penyebab banyaknya buruh yang masih belum sejahtera, padahal mereka telah mendapatkan gaji sesuai atau di atas UMR, sudah mendapat tunjangan dan fasilitas, serta sudah mendapatkan pelatihan pengembangan diri. Kondisi buruh tidak sepenuhnya sejahtera karena masing-masing buruh memiliki tanggungan yang berbeda-beda, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka mengharapkan perlakuan yang dipersonalisasi. Harus ada hal lain yang dilakukan buruh agar mereka dapat lebih sejahtera tanpa sepenuhnya bergantung pada perusahaan. Hal ini mendorong untuk dilaksanakan pertemuan kedua pada hari berikutnya.

Pada pertemuan kedua, bentuk kegiatan tetap berupa sarasehan yang dilaksanakan di tempat yang sama. Dalam sarasehan ini dilakukan diskusi penuh tentang bagaimana entrepreneurship dapat dijalankan oleh para buruh. Dalam diskusi, tim FIKOM banyak membagikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip entrepreneurship yang diajarkan di Universitas Ciputra Surabaya. Selain itu dosen-dosen yang tergabung dalam tim FIKOM juga membagikan pengalaman dari rekan-rekan buruh yang berhasil menjalankan kegiatan entrepreneurship meskipun terikat sebagai pegawai suatu perusahaan. Diskusi dijalankan dalam suasana yang santai, di mana seluruh peserta kegiatan makan dan minum bersama sambil membicarakan isu-isu terkait kesejahteraan buruh dan entrepreneurship bagi buruh. Kegiatan diakhiri dengan kesimpulan bahwa buruh juga bisa meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan entrepreneurship. Tidak ada salahnya memulai berwirausaha saat masih menjadi karyawan. Jika usaha kecil itu berkembang, maka bisa dijadikan alternatif pekerjaan saat sudah pensiun atau bahkan bisa memilih untuk tidak lagi bekerja sebagai buruh. Meskipun diskusi telah berakhir, tim FIKOM memberikan kontak langsung kepada perwakilan dari serikat buruh. Hal ini untuk membuka ruang komunikasi bagi para buruh jika ingin mengembangkan usaha mereka, serta menjaga silaturahmi antara tim FIKOM dan serikat buruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pertemuan pertama tim FIKOM, diwakili oleh beberapa orang mahasiswa menjelaskan hasil survei yang dilakukan sehubungan dengan kesejahteraan buruh di Jawa Timur. Dalam penjelasan ini dipaparkan data hasil survei berupa diagram-diagram serta penjelasan dan analisisnya. Dari pemaparan ini, perwakilan serikat buruh menyampaikan keraguan mereka bahwa kondisi buruh cukup sejahtera meskipun kebanyakan telah mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas. Hal ini dikarenakan masing-masing perusahaan memiliki aturan yang berbeda, bahkan dalam satu perusahaan yang sama perlakuan terhadap sesama buruh juga bisa berbeda. Selain itu kondisi dari masing-masing buruh juga berbeda. Buruh yang belum menikah bisa jadi lebih mampu memenuhi kebutuhannya dibanding buruh yang harus menanggung keluarga dengan banyak anak. Berdasarkan hasil diskusi ini, tim FIKOM mencoba memberikan kesadaran bahwa upaya buruh tidak dapat lagi hanya berfokus pada permintaan peningkatan upah. Karena nyatanya tingkat upah dan fasilitas tidak langsung berdampak pada kesejahteraan. Kondisi probadi masing-masing buruh juga memegang peranan. Maka dari itu diperlukan solusi tambahan agar buruh dapat makin sejahtera.

Solusi tersebut dibahas lebih jauh dalam sarasehan kedua, di mana tim FIKOM memperkenalkan entrepreneurship bagi kaum buruh. Kaum buruh tidak perlu merasa bahwa mereka tidak mungkin berwirausaha karena mereka sudah menjadi buruh. Dalam sarasehan ini muncul kekhawatiran seperti tidak punya modal, tidak punya keterampilan, dan tidak ada waktu untuk berwirausaha. Hal ini yang kemudian dijawab oleh tim FIKOM dengan diskusi tentang peluang-peluang berwirausaha bahkan bagi buruh. Tim FIKOM memberikan contoh-contoh usaha kecil yang dapat dilakukan oleh kaum buruh, seperti usaha Food and Beverages, jasa, atau consumer goods yang tidak membutuhkan modal besar. Skema awal yang dilakukan bisa jadi adalah memenuhi kebutuhan sesama karyawan dahulu, karena hal ini lebih mungkin dan mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh, karyawan dapat menjual makan siang bagi sesama karyawan. Jika kesulitan memasak makanan sendiri, karyawan dapat bekerjasama dengan anggota keluarga, tetangga, atau bahkan membeli dari penjual lain. Namun mereka memberi nilai tambah dengan membawakan makanan itu secara langsung ke kantor sehingga karyawan merasa lebih nyaman dan mudah memperoleh makan siang. Hal lain yang dapat dilakukan

adalah menyediakan jasa sesuai keahlian. Sebagai contoh karyawan di bidang promosi yang menguasai berbagai keahlian editing video bisa memberikan kursus online terkait cara-cara editing video. Berbagai kemungkinan dapat diperluas dengan memahami prinsip-prinsip entrepreneurship, seperti creativity, innovation, persistence, dan long life learner.

Dari kedua pertemuan tersebut, diperoleh hasil yaitu kesadaran yang meningkat akan kondisi buruh di Jawa Timur, serta peningkatan pengetahuan untuk melakukan entrepreneurship bagi buruh. Peningkatan kesadaran utamanya adalah kesadaran bahwa sebagian besar kondisi buruh di Jawa Timur telah mendapatkan gaji sesuai atau diatas UMR, telah mendapatkan tunjangan dan fasilitas, serta telah mendapatkan pelatihan pengembangan diri. Meskipun demikian hal ini tidak langsung berkorelasi positif terhadap kesejahteraan buruh, karena setiap buruh memiliki tanggungan hidup yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa hanya menuntut perusahaan memberikan lebih tidak akan banyak membantu buruh. Maka dari itu mereka juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan prinsip-prinsip entrepreneurship agar dapat meningkatkan kesejahterannya.

SIMPULAN

Isu kesejahteraan buruh selalu menjadi masalah yang tidak pernah habis dibahas di Indonesia. Jumlah buruh yang besar menyebabkan isu ini menjadi relevan untuk diperhatikan. Banyak buruh merasa belum sejahtera meskipun sudah memiliki pekerjaan. Berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah pun dirasa belum cukup untuk menaungi dan melindungi mereka. Berdasarkan fenomena ini, tim FIKOM melaksanakan penelitian tentang kesejahteraan buruh di Jawa Timur, yang merupakan provinsi di mana tim FIKOM berdomisili. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar buruh telah mendapatkan gaji sesuai atau diatas UMR, sudah mendapat tunjangan dan fasilitas, serta sudah memperoleh pelatihan pengembangan diri. Meskipun demikian, kondisi mereka tidak lantas sejahtera karena ada tanggungan yang berbeda-beda dari masing-masing buruh.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dilaksanakan kampanye dalam bentuk sarasehan dengan perwakilan serikat buruh yang difasilitasi oleh WADAS. Dalam kampanye ini disampaikan hasil penelitian serta diadakan diskusi untuk meningkatkan kesadaran bahwa entrepreneurship bisa menjadi solusi bagi permasalahan buruh. Dari hasil kampanye, diperoleh kesadaran bahwa kondisi buruh yang sudah terpenuhi hak-haknya berdasarkan peraturan yang berlaku sudah cukup banyak. Namun sayangnya pemenuhan hak tersebut masih belum sepenuhnya bisa meningkatkan kesejahteraan karena tanggungan dari tiap buruh yang berbeda. Hal ini menimbulkan kesadaran lain bahwa tidak memungkinkan bagi buruh untuk sepenuhnya menggantungkan kesejahteraan mereka kepada perusahaan, karena perusahaan tidak mungkin memberikan remunerasi yang dipersonalisasi. Maka dari itu para buruh diperkenalkan dengan prinsip-prinsip dan kegiatan entrepreneurship yang dapat menjadi solusi. Setelah mendapatkan informasi melalui kampanye ini, kesadaran dari perwakilan buruh tentang pentingnya entrepreneurship bagi kaum buruh meningkat, dan mereka ingin mencoba serta membagikan pengetahuan ini kepada rekan-rekan buruh lainnya.

SARAN

Kegiatan kampanye ini masih dilaksanakan sebanyak dua kali dengan bentuk sarasehan. Ke depan kegiatan ini dapat diperluas dengan pemberian workshop kepada buruh yang ingin mengembangkan potensi berwirausaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada WADAS yang telah memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan serikat buruh, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Penulis juga berterima kasih kepada YKBS yang telah memberi dukungan berupa tempat untuk pelaksanaan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2022). Perspektif Kesejahteraan Tenagakerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 38–44.
- Harvianti, R. A., & Kurniadi, O. (2021). Kampanye Komunikasi Ecotransport dalam Mengurangi Transportasi Pribadi. *Jurnal Riset Public Relations*, 1(1), 8–14.
- Milinum, S. N. (2022). Problematika Fleksibilitas Outsourcing (Alih Daya) Pasca-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*,

- 3(5), 412–432. <https://doi.org/10.1080/14672710903537464>
- Soleh, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Usia Pensiun Atas Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Dan Penggantian Hak Di Jawa Timur. *Legal Spirit*, 2(2), 1–15.
- Trimaya, A. (2014). Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 11–20.